

Kolaborasi Pentahelix Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2025

Arizta Zita Vebrinda¹ Auradian Marta²

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: arizta.zita2372@student.unri.ac.id¹ auradian.marta@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru merupakan permasalahan perkotaan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Penanganan permasalahan ini tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif melalui model pentahelix. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru pada periode 2023–2025 dengan menggunakan perspektif Collaborative Governance Regime (CGR). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan aktor pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor telah terbentuk dan berjalan dalam praktik, namun belum berkembang secara optimal sebagai suatu sistem kolaborasi yang terintegrasi. Pada aspek system context dan drivers, keterlibatan aktor dipengaruhi oleh kebutuhan situasional dan ketergantungan antaraktor. Pada aspek collaborative dynamics, proses kolaborasi telah berlangsung namun masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya inklusif. Pada tahap collaborative actions, tindakan kolaboratif telah dilakukan dalam berbagai bentuk, tetapi masih bersifat responsif dan sektoral. Sementara itu, pada aspek collaborative outcomes, terdapat peningkatan kepatuhan masyarakat, respons penanganan kemacetan yang lebih cepat, serta akses informasi yang lebih luas, meskipun hasil tersebut masih terbatas dan belum konsisten. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya terlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antaraktor, peningkatan konsistensi koordinasi, serta pelibatan aktif seluruh aktor pentahelix untuk mewujudkan kolaborasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kolaborasi Pentahelix, Pengelolaan Lalu Lintas, Collaborative Governance Regime

Abstract

Traffic congestion represents a complex urban governance challenge involving multiple actors with diverse roles and interdependent interests. Addressing this issue requires a collaborative approach that transcends sectoral boundaries, particularly through the pentahelix model. This study aims to analyze the implementation of pentahelix collaboration in managing traffic congestion in Pekanbaru City during the 2023–2025 period using the Collaborative Governance Regime (CGR) framework. This research adopts a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, involving government agencies, law enforcement, and relevant stakeholders. The data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that collaborative practices among actors have been established; however, they have not yet evolved into a fully integrated and institutionalized collaborative system. Within the system context and drivers, collaboration is primarily shaped by situational demands and interdependence among actors. In terms of collaborative dynamics, processes such as principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action are present but remain partial and uneven. At the level of collaborative actions, various initiatives have been implemented, yet they tend to be reactive, fragmented, and sector-driven. Meanwhile, collaborative outcomes indicate incremental improvements in

public compliance, responsiveness to traffic congestion, and access to information, although these impacts remain limited and inconsistent. In conclusion, pentahelix collaboration in traffic congestion management remains in a developmental stage and has not been fully institutionalized within a coherent collaborative governance regime. Strengthening cross-actor integration, enhancing coordination mechanisms, and fostering sustained multi-actor engagement are essential to achieving a more effective and sustainable collaborative system.

Keywords: *Pentahelix Collaboration, Traffic Management, Collaborative Governance Regime*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kendaraan bermotor di berbagai kota besar di Indonesia. Kondisi kemacetan tidak hanya berdampak terhadap menurunnya efisiensi transportasi, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, serta kualitas pelayanan publik. Penanganan kemacetan tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui tata kelola kolaboratif lintas sektor. Berbagai kota di Indonesia telah menerapkan kebijakan transportasi yang melibatkan banyak aktor dalam penanganan kemacetan lalu lintas. Jakarta, misalnya, mengembangkan sistem integrasi transportasi publik melalui program JakLingko serta pengembangan MRT dan LRT dengan dukungan pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sektor swasta. Sementara itu, Kota Surabaya menerapkan pengembangan transportasi publik dan pengaturan perpustakaan melalui kerja sama pemerintah daerah, BUMD, serta dukungan teknologi dan sektor usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemacetan membutuhkan sinergi lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan secara individual.

Dalam konteks tata kelola publik modern, pendekatan kolaboratif berkembang melalui model pentahelix yang melibatkan lima unsur utama, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media (Pane et al., 2025). Model *pentahelix* dipandang mampu menciptakan solusi yang lebih partisipatif, inovatif, dan berkelanjutan dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks, termasuk kemacetan lalu lintas. Pendekatan ini menjadi relevan karena setiap aktor memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam proses perumusan kebijakan, penyediaan data, inovasi teknologi, penyebaran informasi, hingga penguatan partisipasi masyarakat. Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Riau juga menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Electronic Registration and Identification (ERI) Korps Lalu Lintas Polri, jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru meningkat dari 1.182.795 unit pada tahun 2024 menjadi 1.225.327 unit pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut berdampak langsung terhadap beban lalu lintas kota yang belum diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai. Selain itu, terdapat delapan titik rawan kemacetan yang secara konsisten mengalami kepadatan lalu lintas pada periode 2023–2025, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Penelitian terdahulu mengenai collaborative governance dan model pentahelix telah banyak dilakukan. Penelitian Winzila Mahfuzah (2022) mengenai pentahelix dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor belum berjalan optimal karena masih lemahnya komunikasi dan keterlibatan lintas sektor. Penelitian Venike Sriyanti (2024) tentang collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota

Makassar menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan, namun belum optimal dalam aspek koordinasi dan komitmen antarstakeholder. Selain itu, penelitian pada Jurnal Media Birokrasi (2024) mengenai penanganan kemacetan di Kota Surabaya menemukan bahwa kolaborasi yang terjadi masih bersifat instruktif dan belum berbasis kesepakatan formal antarpihak. Meskipun berbagai penelitian mengenai collaborative governance telah dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pola kerja sama formal antarinstansi dan belum secara spesifik menganalisis dinamika kolaborasi berbasis model pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash, sedangkan penelitian mengenai kemacetan berbasis pendekatan Collaborative Governance Regime (CGR) masih relatif terbatas.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson dan Nabatchi untuk menganalisis dinamika kolaborasi pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak hanya menelaah bentuk kerja sama antaraktor, tetapi juga menganalisis konteks sistem, faktor penggerak kolaborasi, dinamika interaksi antaraktor, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi yang muncul dalam proses penanganan kemacetan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada keterlibatan lima unsur utama pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam konteks kemacetan perkotaan di Kota Pekanbaru periode 2023–2025. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana dinamika kolaborasi stakeholders berbasis model pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru dalam kerangka Collaborative Governance Regime (CGR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dinamika kolaborasi antaraktor pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru tahun 2023–2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis dinamika kolaborasi antar stakeholders berbasis model pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru tahun 2023–2025. Penelitian deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses kolaborasi yang terjadi antaraktor dalam pengelolaan kemacetan lalu lintas. (Sugiyono, 2014). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan fokus pada delapan titik rawan kemacetan yang secara konsisten mengalami kepadatan lalu lintas selama periode 2023–2025. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Pekanbaru merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Riau dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha transportasi, media, dan masyarakat. Unsur pemerintah meliputi Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Unsur akademisi berasal dari Universitas Riau. Unsur pelaku usaha berasal dari sektor transportasi digital, sedangkan unsur media dan masyarakat terdiri dari media lokal dan pengguna jalan di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan penelitian untuk memperoleh data

mengenai proses kolaborasi antaraktor dalam penanganan kemacetan lalu lintas. Observasi dilakukan pada beberapa titik rawan kemacetan di Kota Pekanbaru guna melihat kondisi lalu lintas dan bentuk penanganan yang dilakukan oleh para stakeholders. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data pendukung berupa dokumen kebijakan, data instansi, foto kegiatan, serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil penelitian sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan proses interpretasi data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika kolaborasi stakeholders berbasis model pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan konsisten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru menunjukkan karakteristik yang bersifat struktural dan berulang, terutama pada delapan titik rawan macet yang relatif stabil selama periode 2023–2025. Temuan ini menunjukkan bahwa kemacetan di Kota Pekanbaru bukan lagi sekadar persoalan teknis lalu lintas, melainkan telah berkembang menjadi persoalan tata kelola perkotaan yang membutuhkan penanganan kolaboratif lintas sektor. Secara ilmiah, stabilitas titik kemacetan dalam kurun waktu tiga tahun menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan kapasitas infrastruktur jalan. Jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru meningkat dari 1.182.795 unit pada tahun 2024 menjadi 1.225.327 unit pada tahun 2025. Namun peningkatan tersebut tidak diikuti dengan perluasan kapasitas jalan maupun penguatan sistem transportasi publik secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan beban lalu lintas terkonsentrasi pada titik tertentu dan menghasilkan pola kemacetan yang konsisten pada jam sibuk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kemacetan di Kota Pekanbaru telah melibatkan unsur-unsur pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Akan tetapi, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem collaborative governance yang kuat. Kolaborasi yang terjadi masih cenderung bersifat sektoral dan berbasis respons situasional. Fenomena tersebut terjadi karena dominasi aktor pemerintah masih sangat kuat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Dinas PUPR menjadi aktor utama yang mengendalikan proses manajemen lalu lintas. Sementara itu, aktor non-pemerintah seperti akademisi, komunitas, dan pelaku usaha lebih banyak berperan sebagai pendukung kebijakan dibanding sebagai mitra strategis dalam proses perumusan solusi.

System Context dan Drivers dalam Kolaborasi Pentahelix

Konteks sistem (system context) dalam penelitian ini dibentuk oleh tingginya mobilitas kendaraan, pertumbuhan perkotaan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di Provinsi Riau. Selain itu, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan turut menjadi landasan formal dalam pelaksanaan koordinasi lintas instansi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa faktor utama yang mendorong lahirnya kolaborasi adalah adanya

ketergantungan antaraktor dalam menangani kemacetan. Dinas Perhubungan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas di lapangan, sementara Dinas PUPR dibutuhkan dalam penyediaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Di sisi lain, media dan masyarakat berperan dalam penyebaran informasi kondisi lalu lintas dan peningkatan kesadaran publik. Secara teoritis, kondisi tersebut sesuai dengan konsep *drivers* dalam teori Collaborative Governance Regime (CGR) yang menekankan bahwa kolaborasi muncul akibat adanya interdependensi antaraktor terhadap suatu persoalan publik yang kompleks (Emerson & Nabatchi, 2015). Dalam konteks Kota Pekanbaru, kemacetan menjadi isu yang tidak dapat diselesaikan secara individual oleh satu institusi sehingga mendorong terbentuknya kerja sama lintas sektor. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa kolaborasi yang terbentuk masih lebih didorong oleh kebutuhan praktis jangka pendek dibanding visi kolektif jangka panjang. Hal ini terlihat dari pola koordinasi yang lebih aktif pada jam sibuk atau saat terjadi kepadatan tinggi, tetapi belum berkembang menjadi sistem transportasi kolaboratif yang terencana secara berkelanjutan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Venike Sriyanti (2024) di Kota Makassar yang menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penanganan kemacetan telah berjalan, tetapi belum optimal pada aspek koordinasi dan komitmen bersama. Akan tetapi, penelitian ini menemukan dimensi yang lebih luas karena menggunakan pendekatan pentahelix dan teori Collaborative Governance Regime (CGR) yang tidak hanya melihat koordinasi kelembagaan, tetapi juga dinamika hubungan antar lima aktor utama.

Collaborative Dynamics dalam Penanganan Kemacetan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa collaborative dynamics dalam penanganan kemacetan di Kota Pekanbaru telah terbentuk melalui komunikasi lintas instansi, forum koordinasi, pengaturan lalu lintas bersama, serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, proses collaborative dynamics tersebut belum berjalan secara optimal. Pada aspek principled engagement, keterlibatan para aktor masih didominasi oleh pemerintah dan aparat lalu lintas. Akademisi belum terlibat secara intensif dalam penyusunan kebijakan berbasis riset transportasi, sementara masyarakat masih ditempatkan sebagai objek kebijakan dibanding subjek kolaborasi. Akibatnya, proses discovery, definition, dan deliberation dalam collaborative governance belum berlangsung secara partisipatif. Secara ilmiah, kondisi tersebut terjadi karena pola tata kelola transportasi di daerah masih cenderung menggunakan pendekatan administratif birokratis dibanding model governance kolaboratif. Pengambilan keputusan masih terpusat pada instansi pemerintah sehingga ruang dialog lintas aktor menjadi terbatas. Pada aspek shared motivation, penelitian menemukan bahwa hubungan antaraktor telah dibangun melalui koordinasi rutin dan kepentingan bersama untuk mengurangi kemacetan. Namun tingkat trust dan komitmen antaraktor belum sepenuhnya kuat karena masing-masing lembaga masih berorientasi pada tugas sektoralnya sendiri. Hal ini menyebabkan integrasi kebijakan belum berjalan secara menyeluruh. Sementara pada aspek capacity for joint action, penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kolaborasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya, integrasi data lalu lintas, serta mekanisme koordinasi yang belum permanen. Akibatnya, tindakan kolaboratif yang dilakukan sering kali bersifat reaktif terhadap kondisi lapangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian pada Jurnal Media Birokrasi (2024) mengenai penanganan kemacetan di Surabaya yang menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup efektif, namun masih berbasis instruksi pimpinan dan belum sepenuhnya dibangun melalui kesepakatan formal antarstakeholder. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa tantangan collaborative dynamics di Kota Pekanbaru lebih

dipengaruhi oleh lemahnya integrasi antar unsur pentahelix dibanding sekadar persoalan koordinasi formal.

Collaborative Actions dalam Penanganan Kemacetan

Tindakan kolaboratif (*collaborative actions*) diwujudkan melalui berbagai aktivitas bersama seperti pengaturan lalu lintas pada jam sibuk, pemasangan CCTV, pengawasan titik rawan macet, sosialisasi tertib lalu lintas, serta penyebaran informasi melalui media. Temuan ilmiah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative actions* yang dilakukan masih berorientasi pada pengendalian dampak kemacetan, bukan penyelesaian akar masalah kemacetan itu sendiri. Hal ini terlihat dari dominannya tindakan pengaturan arus kendaraan dibanding pembangunan sistem transportasi publik atau kebijakan pengurangan kendaraan pribadi. Fenomena tersebut terjadi karena pendekatan penanganan kemacetan di Kota Pekanbaru masih lebih menitikberatkan pada manajemen lalu lintas jangka pendek. Sementara upaya struktural seperti integrasi transportasi publik, pembatasan kendaraan, maupun pengembangan mobilitas berkelanjutan belum berkembang secara optimal. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan media dan masyarakat lebih dominan dalam fungsi penyebaran informasi dibanding pengawasan kebijakan secara aktif. Padahal dalam model pentahelix, media seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas transparansi dan pembentuk opini publik. Jika dibandingkan dengan penelitian *collaborative governance* di Surabaya, praktik *collaborative actions* di Pekanbaru masih berada pada tahap berkembang karena belum didukung oleh integrasi sistem transportasi dan inovasi mobilitas perkotaan yang kuat.

Impacts and Adaptation dalam Kolaborasi Pentahelix

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix memberikan dampak positif berupa meningkatnya koordinasi antarinstansi, meningkatnya penyebaran informasi lalu lintas kepada masyarakat, serta meningkatnya respons penanganan pada titik rawan macet. Namun demikian, dampak tersebut belum mampu menurunkan secara signifikan pola kemacetan yang terjadi secara berulang pada delapan titik utama Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa *collaborative outcomes* yang dihasilkan masih bersifat parsial dan belum menyentuh perubahan sistemik. Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses *adaptation* dalam *Collaborative Governance Regime (CGR)* belum berkembang secara optimal. Hasil kolaborasi belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan penguatan kebijakan jangka panjang. Akibatnya, pola kemacetan tetap stabil dari tahun ke tahun. Dengan demikian, penelitian ini menjawab hipotesis penelitian bahwa kolaborasi pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru telah berjalan, tetapi belum terintegrasi secara optimal dalam kerangka *collaborative governance* yang berkelanjutan. Kolaborasi yang terbentuk masih menghadapi kendala koordinasi, dominasi aktor pemerintah, keterbatasan partisipasi non-pemerintah, serta lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholders berbasis model pentahelix dalam penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru telah melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam kerangka *Collaborative Governance Regime (CGR)*. Kolaborasi tersebut terbentuk karena adanya kebutuhan bersama untuk menangani permasalahan kemacetan yang bersifat kompleks, berulang, dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi telah

berjalan melalui koordinasi antarinstansi, pengaturan lalu lintas, penyebaran informasi publik, serta keterlibatan beberapa aktor non-pemerintah dalam mendukung pengelolaan lalu lintas di Kota Pekanbaru. Namun, proses kolaborasi tersebut belum berlangsung secara optimal karena masih ditemukan kendala dalam integrasi antaraktor, konsistensi koordinasi, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan aktor non-pemerintah yang masih terbatas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam perspektif *Collaborative Governance Regime* (CGR), penelitian ini menemukan bahwa dimensi *system context* dan *drivers* menjadi faktor utama yang mendorong terbentuknya kolaborasi, terutama akibat meningkatnya volume kendaraan dan stabilitas titik rawan kemacetan di Kota Pekanbaru selama periode 2023–2025. Sementara itu, pada dimensi *collaborative dynamics* dan *collaborative actions*, para aktor telah melakukan berbagai bentuk kerja sama, namun implementasinya masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu mekanisme kolaboratif yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pentahelix memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola penanganan kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru, tetapi memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kolaborasi antaraktor, serta pengembangan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas kebijakan transportasi perkotaan berbasis teknologi dan integrasi sistem transportasi cerdas sebagai bentuk pengembangan kolaborasi pentahelix dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. V., & Fitriati, R. (2023). Membangun Model Kolaborasi Penta Helix Pada Mass Rapid Transit Jakarta Building A Penta Helix Collaboration Model On Mass Rapid Transit Jakarta. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 5(2).
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes* (N. putens, Ed.; 1st ed.). Georgetown University Press.
- Miles, M. B., H. A. M., & S. J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.).
- Pane, R. P., Nasution, H. F., Susanto, A., Yusri, A., Rafi, M., Asrida, W., & Alby, S. (2025). *Desain Sinergitas Pentahelix Untuk Kemajuan Pariwisata Indonesia*. Penamuda Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- Putra, R. K. B. (2019). Kolaborasi Stakeholders dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas melalui Pendekatan Pentahelix Model (pp. 1–256).
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian dan Teknik Analisa Data. *Jurnal Akuntansi*, 3.
- Syarifudin Yahya, A., Kusmana, D., & Rahmawati Sururama, dan. (n.d.). *Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i1.4151>
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas, termasuk penanganan kemacetan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)